



## Original Article

### Tinjauan Psikologi Politik Generasi Muda Indonesia mengenai Pancasila dan Demokrasi

Larasati Marutika Arbi<sup>1✉</sup>, Raja Oloan Tumanggor<sup>2</sup>, Michelle Patricia Mustopo<sup>3</sup>, Anjani Rahmah Suci<sup>4</sup>, Nadya Serafin Aprillia Wiranto<sup>5</sup>, Shelly Kusuma<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Jalan Letjen S. Parman No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11440

Correspondence Author: [larasati.705220293@stu.untar.ac.id](mailto:larasati.705220293@stu.untar.ac.id) ✉

#### Abstrak:

Generasi muda menempati posisi strategis dalam menjaga keberlanjutan demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi kelompok yang paling dekat dengan perubahan sosial, budaya, dan politik di era globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara menyediakan landasan normatif bagi praktik demokrasi, namun dalam penerapannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi politik, pengaruh media digital, serta kecenderungan apatisisme di kalangan generasi muda. Kajian ini bertujuan untuk meninjau keterkaitan antara Pancasila, demokrasi Indonesia, dan psikologi politik generasi muda melalui kajian literatur. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan model *hybrid* sistematis-naratif, yang memadukan prosedur pencarian artikel secara sistematis dengan analisis tematik. Artikel diperoleh dari basis data akademik seperti Google Scholar dan ResearchGate, dengan kriteria inklusi publikasi ilmiah terbit tahun 2022–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk memperkuat praktik demokrasi berbasis Pancasila melalui partisipasi politik, penguatan etika berdemokrasi, dan peran aktif dalam ruang digital. Namun, hambatan seperti disinformasi, dominasi politik identitas, dan lemahnya internalisasi nilai Pancasila masih membatasi kontribusi tersebut. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi Indonesia bergantung pada sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dalam psikologi politik generasi muda, sehingga mereka mampu berperan sebagai agen perubahan yang kritis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

**Kata kunci:** Pancasila; demokrasi; generasi muda; psikologi politik

#### Pendahuluan

##### Sub 1 Latar Belakang

Pada masa sekarang, Indonesia sedang berada dalam era bonus demografi di mana populasi usia produktif khususnya generasi muda telah mendominasi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2025, menunjukkan



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

terdapat 66.764 penduduk di Indonesia yang merupakan pemuda dengan rentang usia 16 sampai 30 tahun.

Data statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemuda sebagai pemilih mencapai porsi yang sangat signifikan dalam setiap pemilihan umum. Hal ini menjadikan generasi muda sebagai kekuatan politik yang tidak bisa lagi disepelekan. Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu August Mellaz, pada Pemilihan Umum 2024, pemilih dari Generasi Z dan juga Milenial mencapai 55% dari total pemilih (Komisi Pemilihan Umum, 2023). Besarnya jumlah ini menempatkan generasi muda berada di garis depan sebagai penentu arah demokrasi bangsa, serta pandangan dan keputusan generasi muda juga akan sangat memengaruhi masa depan politik Indonesia.

Namun, partisipasi generasi muda sering kali dihadapkan pada paradoks, di mana kemajuan teknologi digital dapat membuka akses informasi politik yang luas, tetapi sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik juga meningkat ([Affandi dan Katimin, 2025](#)). Nyatanya, melalui penelitian yang dilakukan oleh [Putra, et al., \(2025\)](#) ditemukan bahwa partisipasi politik generasi muda di era media sosial mengalami transformasi yang signifikan dari bentuk-bentuk konvensional menuju pola partisipasi digital yang lebih fleksibel, ekspresif, dan berbasis nilai personal.

Di sisi lain, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti politik uang, polarisasi, dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Menurut Batubara (dalam [Affandi dan Katimin, 2025](#)), meskipun media sosial mendominasi sumber informasi politik, tetapi media sosial juga dapat dijadikan sebagai pemicu terjadinya polarisasi dan penyebaran hoaks, sehingga gagal dalam meningkatkan literasi politik yang substantif.

Adanya berbagai tantangan yang terjadi dapat menciptakan disrupsi dan ketidakstabilan, sehingga praktik demokrasi sering terlihat jauh dari ideal. Sebagaimana disampaikan oleh [Noor \(2018\)](#), yang menyatakan eksistensi dan pertumbuhan demokrasi di Indonesia masih jauh dari sempurna karena masih memberikan ruang yang cukup lapang bagi munculnya praktik politik yang mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan masa depan demokrasi, terutama di tangan generasi yang akan mewarisi tantangan yang ada.

Di tengah berbagai tantangan yang ada, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara hanya dianggap sebagai hafalan semata, tanpa adanya pemahaman mendalam tentang perannya sebagai pedoman politik dan moral. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga harus dipahami serta diimplementasikan oleh setiap warga negara Indonesia, sehingga nilai-nilai luhur dalam Pancasila bersifat mengikat setiap tatanan kehidupan bermasyarakat ([Aini dan Dewi, 2022](#)). Tetapi, nilai-nilai seperti musyawarah dan keadilan sosial yang ada pada Pancasila seolah kehilangan relevansinya dalam praktik politik sehari-hari.

Pemahaman yang dangkal mengenai Pancasila, membuat Pancasila gagal berperan sebagai pondasi persatuan bangsa. Tantangan terbesar dalam aktualisasi Pancasila di era demokrasi modern sendiri adalah lemahnya internalisasi nilai pada generasi muda. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh [Purnama dan Ananda \(2021\)](#) yang menemukan kurangnya motivasi dari generasi muda untuk berpartisipasi. Hal ini mempertegas pentingnya kajian lebih lanjut mengenai peran Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada pada politik Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi situasi yang ada. Tidak cukup hanya dengan mengamati perilaku yang ada di permukaan, tetapi juga harus menyelami aspek-aspek internal

individu. Melalui kerangka psikologi politik, artikel ini akan menganalisis bagaimana generasi muda memaknai dan berinteraksi dengan demokrasi Indonesia dalam konteks nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sikap, motivasi, serta pandangan politik dari generasi muda untuk memperkuat partisipasi politik mereka demi terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif dan berlandaskan Pancasila.

### Sub 2 Rumusan Masalah

Mengacu pada konteks yang dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dari artikel ini adalah mengenai bagaimana tinjauan psikologi politik dapat menjelaskan persepsi, sikap, pola partisipasi politik generasi muda di Indonesia, serta bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk pandangan dan perilaku mereka di tengah tantangan demokrasi saat ini.

### Sub 3 Tujuan Kajian

Sejalan dengan rumusan masalah kajian, artikel ini bertujuan untuk menelaah literatur yang membahas peran generasi muda dalam demokrasi Indonesia dari perspektif psikologi politik, sekaligus mengidentifikasi relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk sikap dan perilaku politik generasi muda.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan model *hybrid* sistematik-naratif. Pendekatan ini dipilih karena pendekatan *hybrid* sistematik-naratif dapat menggabungkan dua manfaat dari model sistematik dan naratif, sehingga hasil analisis dapat lebih jelas secara prosedural dan konseptual yang dalam (Turnbull D., Chugh R., & Luck J., 2023). Proses penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, seperti Google Scholar dan ResearchGate, dengan menggunakan kata kunci “generasi muda”, “demokrasi”, “internalisasi pancasila”, “partisipasi politik”, “psikologi politik”, demokrasi Indonesia”. Dari penelusuran tersebut, ditemukan kajian-kajian literatur dan pembahasan sebagai berikut.

## Hasil

### Sub 1 Kajian Literatur

Psikologi politik merupakan bidang interdisipliner yang menerapkan konsep, teori, dan metode psikologi untuk menjelaskan cara orang mempersepsi, menilai dan bertindak dalam konteks politik (Huddy, Sears, & Levy, 2023). Hal ini dimulai dari pembentukan opini, pembentukan identitas politik, pengambilan keputusan pemilih, hingga kepemimpinan dan kebijakan luar negeri. Esensi dari psikologi politik merupakan proses mental seperti kognisi, emosi, motivasi dan identitas dalam pembentukan dunia politik, sebaliknya, pembentukan balik pikiran dan perilaku manusia akan terjadi ketika konflik politik serta institusi terjadi (Huddy, Sears, & Levy, 2013).

Realita politik cenderung tidak diterima oleh masyarakat secara langsung, namun, informasi cenderung difilter melalui *framing* (Lecheler & de Vreese, 2018), *motivated reasoning* (Ditto et al., 2018), *misinformation* dan *elite cues* (Bäck et al., 2023). Sikap dan identitas politik terbentuk melalui kebutuhan psikologis, nilai, dan informasi, sikap politik cenderung menyoroti dua pola yang pertama merupakan psikologi ideologi. Psikologi ideologi merujuk pada pencaharian kebutuhan psikologis, gaya kognitif, emosi terhadap ancaman hingga konteks informasi yang dapat memicu suatu ideologi terbentuk,

yang kedua adalah polarisasi afektif. Polarisasi afektif yang merupakan kondisi dimana individu yang memiliki opini kuat terhadap sesuatu didunia politik dan memandang individu lain yang tidak memiliki opini yang sama salah atau memandang mereka sebagai lawan ([Iyengar et al., 2019](#)). Partisipasi dalam politik cenderung ditentukan oleh motivasi, kemampuan, sumber daya, dan rekrutmen secara online. Dalam teori *Civic Voluntarism Model*, dijelaskan bahwa masyarakat cenderung berpartisipasi dalam aksi politik karena 3 hal ya itu sumber daya, dalam bentuk waktu, kapasitas, dan uang, keterlibatan psikologis, seperti minat politik, efikasi politik, dan obligasi kewargaan, dan yang terakhir adalah rekrutmen.

Masa remaja hingga dewasa awal merupakan fase pembentukan identitas diri yang intens ([Erikson, 1968](#)). Pada periode ini, preferensi dan kebiasaan politik cenderung terbentuk dan akan memberi jejak jangka panjang dalam lintasan hidup seorang individu meski opini itu dapat berubah ([Jennings, Stoker, & Bowers, 2009](#)). Informasi yang diterima oleh generasi muda juga berbeda secara mendasar, politik yang dapat diakses melalui ruang digital cenderung telah melewati proses *framing*, *motivated reasoning*, *misinformation* dan *elite cues*. Di Indonesia sendiri, urgensi anak muda untuk memahami politik semakin terlihat, contohnya, pada pemilu 2024, kampanye kompetisi elektoral secara eksplisit menargetkan anak muda dengan kelompok usia 17 hingga 43 tahun yang memiliki hak suara dan mencakup 55% dari keseluruhan pemilih ([Associated Press, 2024](#)). Seiring dengan perkembangan generasi, generasi muda akan diharuskan untuk memiliki kesadaran politik karena itulah yang akan menjadi masa depan mereka.

Pada saat ini dinamika demokrasi di Indonesia didominasi oleh generasi muda. Penelitian yang dilakukan oleh Datanesia berdasarkan Survei Ekonomi Nasional pada tahun 2022, memprediksi bahwa lebih dari 116.5 juta atau sebesar 56 persen pemilik suara pada pemilu 2024 akan berasal dari generasi muda yang terdiri atas generasi milenial dan generasi Z ([Hasyati, 2023](#)). Data terbaru yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas dan Informasi Publik KPU RI, Reni Rinjani menyatakan terdapat 46.800.161 (22.85%) pemilih generasi Z dan generasi milenial yang berjumlah 68.822.389 (33.60%) tercatat sebagai pemilik suara pada pemilu 2024 ([Adnan, 2024](#)). Meskipun, data tersebut menunjukkan angka yang relatif tinggi pada keterlibatan generasi muda, menurut [Ningrum \(2023\)](#), masih terdapat kekhawatiran, yaitu pada generasi muda yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau yang lebih dikenal dengan istilah golongan putih (golput). Fenomena ini masih menjadi tantangan besar, sikap apatis yang dimiliki sebagian besar pemilik suara menjadi salah satu faktor yang mendorong angka golput di Indonesia ([Ayu, 2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa data kuantitatif dapat tidak berbanding lurus dengan kualitas partisipasi generasi muda.

Menurut [Septianingrum \(2025\)](#), generasi muda yang seringkali digaungkan sebagai *agent of change* justru terlihat menjauh dari hal-hal yang berkaitan dengan politik, baik sebagai pemilik suara maupun keterlibatan mereka sebagai aktor politik. Apatisme dalam generasi muda memang bukanlah hal yang baru, namun hal ini tidak hanya sebatas generasi muda tidak peduli. Melainkan, ketika ruang politik dipenuhi oleh orang-orang berkuasa dengan wajah-wajah yang dikenal karena dinastinya, tentu saja hal ini membuat generasi muda merasa tidak punya tempat untuk bersuara ([Septianingrum, 2025](#)). Saat ini, generasi muda turut serta mengekspresikan keresahannya melalui seni, aksi sosial, dan media sosial. Pernyataan ini didukung oleh penelitian [Zainudin \(2024\)](#) yang menunjukkan sekitar 91 persen generasi Z mengandalkan media sosial sebagai sumber utama untuk mengakses informasi politik. *Digital Activism* kini menjadi bentuk keterlibatan baru di generasi muda, mereka memanfaatkan platform seperti Instagram,

Tiktok, dan X untuk menyuarakan keterlibatan dalam isu-isu politik ([Ramadhani et al., 2025](#)). Namun, keterlibatan generasi muda ini dapat dipengaruhi oleh dinamika psikologis tertentu, salah satunya adalah *Fear of Missing Out* (FoMO) politik. [Tualeka \(2025\)](#) mengatakan bahwa banyak keputusan diambil bukan karena pertimbangan rasional, namun karena dorongan untuk diakui dan tidak ingin tertinggal oleh kelompok sebaya yang telah lebih dahulu terlibat dalam ruang politik.

Meskipun sebagian orang cenderung menghakimi generasi muda yang hanya FoMO politik, jika dilihat dari kacamata yang lebih positif, FoMO politik ini dapat menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki kesadaran terhadap isu-isu politik serta pengharapan terhadap demokrasi Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat [Hernawan dan Azizah \(2024\)](#) yang mengatakan bahwa dengan melibatkan diri dan berusaha untuk memahami, sebagai generasi muda kita tidak hanya sekedar mengikuti tren, tetapi juga berperan dalam membentuk masa depan politik yang lebih baik.

Di samping hal tersebut, tingkat kepercayaan yang dimiliki generasi muda terhadap instansi politik juga perlu perhatian lebih. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh IDN Research Institute pada Februari hingga April 2025 yang melibatkan 1.500 responden dari generasi muda, menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tidak percaya pada lembaga politik ([Nafian, 2025](#)). [Nafian \(2025\)](#) menambahkan bahwa ketidakjelasan kebijakan, penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan penegakan hukum dan janji politik yang kerap kali diingkari menjadi faktor utama ketidakpercayaan generasi muda pada lembaga politik. Rendahnya kepercayaan pada instansi atau lembaga politik inilah yang mendorong generasi muda untuk mencari alternatif lain agar dapat menyalurkan aspirasi, melakukan gerakan sosial, hingga memberikan dukungan pada figur independen yang dianggap lebih relevan. Dengan demikian, keterlibatan generasi muda tidak hanya sebatas pemilik suara pasif atau sekedar FoMO politik. Melainkan sebagai peran penting dalam demokrasi melalui cara yang mungkin cenderung berbeda dari generasi sebelumnya.

Secara konstitusional, Pancasila telah ditempatkan sebagai dasar filosofis penyelenggaraan negara melalui Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Ditulis secara eksplisit bahwa lima sila ditegaskan sebagai fondasi normatif kehidupan bernegara. Hal tersebut tidak hanya simbolik melainkan menjadi kerangka nilai yang memadu tujuan bernegara. Nilai-nilai pancasila yang relevan bagi demokrasi dapat ditemukan pada sila ketiga yang membahas tentang persatuan, keempat yang membahas mengenai musyawarah dan kelima yang berbicara mengenai keadilan sosial. Persatuan Indonesia memposisikan keutuhan komunitas politik sebagai persyaratan berfungsinya demokrasi. Pembukaan UUD 1945 menegaskan negara untuk melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sila keempat menegaskan karakter deliberatif dan representatif demokrasi Indonesia. Prinsip ini tidak hanya sekedar etika deliberasi, melainkan kaidah prosedur lembaga perwakilan. Keadilan sosial berfungsi sebagai tujuan normatif demokrasi pancasila seperti, memformalkan hak-hak sosial-ekonomi sebagai ukuran substantif legitimasi demokrasi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945).

Penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai pancasila, demokrasi dan kaitannya pada generasi muda telah banyak dilakukan. Dalam konteks perkembangan teknologi dan arus perubahan sosial, [Tirtoni \(2022\)](#) menemukan bahwa generasi muda belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa generasi muda masih rentan terhadap kecenderungan mengikuti suatu hal tanpa landasan nilai yang kuat. Penelitian ini diperkuat oleh [Zura et al., \(2023\)](#) yang dalam penelitiannya menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai pancasila, agar generasi muda memiliki pedoman moral terutama

dalam keterlibatan mereka dalam ruang politik.

Kemudian, dalam konteks demokrasi, [Albary \(2025\)](#) mengkaji tentang pentingnya pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran demokrasi. Dalam temuannya, [Albary \(2025\)](#) menyampaikan bahwa stigma negatif yang disertai kurangnya integrasi pendidikan politik dalam kurikulum formal menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh [Irwandi et al., \(2023\)](#) menemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik generasi muda diakibatkan oleh buruknya politik di Indonesia yang identik dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan politik dan Pancasila yang disertai ruang partisipasi yang lebih terbuka dipandang sebagai faktor penting untuk mengubah sikap apatis generasi muda menjadi keterlibatan yang lebih aktif dan demokratis.

Berdasarkan keempat studi tersebut, dapat diketahui bahwa generasi muda Indonesia saat ini menghadapi tantangan, baik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila maupun dalam kualitas partisipasi politik. Dengan penguatan pendidikan politik yang efektif, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila, diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam membangun demokrasi yang berlandaskan pada Pancasila dan bersifat inklusif bagi semua lini masyarakat.

## Sub 2 Pembahasan

Generasi muda sebagai kelompok demografis terbesar dalam pemilu Indonesia memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi. Persepsi mereka terhadap demokrasi sangat beragam, mulai dari pandangan yang optimistis hingga sikap skeptis. Sebagian generasi muda melihat demokrasi sebagai sistem yang memberi ruang kebebasan berpendapat, menjamin hak politik, serta memungkinkan mereka untuk turut serta menentukan kebijakan melalui suara dalam pemilihan umum ([Adnan, 2024](#)). Bagi mereka, demokrasi bukan hanya sekadar prosedur elektoral, melainkan juga sarana aktualisasi diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan negatif terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Generasi muda banyak yang menilai bahwa demokrasi saat ini sarat dengan praktik pragmatisme politik, seperti politik uang, oligarki, dan dinasti politik ([Muhtadi, 2019](#)). Fenomena tersebut membuat sebagian pemuda kehilangan kepercayaan dan menganggap bahwa keterlibatan mereka tidak akan mengubah situasi yang sudah mapan. Akibatnya, muncul sikap apatis atau bahkan memilih golput, sebagaimana banyak dibahas dalam survei terbaru ([Ningrum, 2023](#); [Ayu, 2024](#)).

Apatisme generasi muda bukan berarti ketidakpedulian total, melainkan refleksi dari kekecewaan terhadap sistem yang dianggap tidak akuntabel. Meskipun demikian, sikap ini menimbulkan paradoks: jumlah pemilih muda sangat besar, tetapi kualitas partisipasi politik mereka belum sepenuhnya mencerminkan peran strategis yang diharapkan ([Septianingrum, 2025](#)). Dengan kata lain, meskipun demokrasi dianggap ideal secara konsep, penerapannya di Indonesia menimbulkan rasa frustrasi di kalangan generasi muda.

Lebih jauh, persepsi generasi muda juga dipengaruhi oleh perkembangan media sosial. Banyak pemuda menganggap media sosial sebagai sarana utama untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Bahkan, sebagian besar generasi Z lebih percaya pada informasi yang beredar di media sosial dibandingkan dengan media arus utama ([Zainudin, 2024](#)). Hal ini menandakan adanya pergeseran cara generasi muda

memahami demokrasi, dari model partisipasi formal menuju partisipasi digital yang lebih cair dan fleksibel.

Untuk memahami pola partisipasi politik generasi muda, kerangka psikologi politik sangat relevan digunakan. Pertama, faktor efikasi politik (*political efficacy*) berperan besar. Efikasi politik mengacu pada keyakinan individu bahwa tindakannya dapat memengaruhi hasil politik. Generasi muda dengan tingkat efikasi politik tinggi cenderung aktif menggunakan hak pilih, bergabung dalam organisasi sosial, atau melakukan advokasi kebijakan. Sebaliknya, rendahnya efikasi politik menimbulkan rasa tidak berdaya dan mendorong perilaku golput ([Albary, 2025](#)).

Kedua, aspek *trust* atau kepercayaan politik menjadi faktor kunci. Survei IDN Research Institute tahun 2025 menemukan bahwa sebagian besar generasi muda Indonesia tidak mempercayai lembaga politik formal seperti partai dan DPR, karena dianggap sarat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta janji politik yang sering diingkari ([Nafian, 2025](#)). Rendahnya tingkat kepercayaan ini menjelaskan mengapa generasi muda lebih memilih menyalurkan aspirasi melalui cara nonformal, misalnya melalui komunitas independen, aktivisme sosial, atau dukungan terhadap figur politik yang dianggap lebih kredibel.

Ketiga, faktor emosi kolektif juga signifikan dalam mendorong partisipasi politik. Banyak pemuda terdorong ikut aksi politik bukan karena rasionalitas kalkulatif, melainkan karena rasa marah, kecewa, atau ketidakadilan yang mereka rasakan. [Tualeka \(2025\)](#) menyebut fenomena ini sebagai bentuk mobilisasi berbasis emosi, yang sering kali terlihat dalam aksi demonstrasi besar. Emosi kolektif ini menjadikan partisipasi politik lebih bersifat spontan, namun sekaligus kuat dalam menggugah solidaritas.

Keempat, identitas politik generasi muda cenderung cair. Mereka tidak lagi terikat pada ideologi besar seperti nasionalisme, liberalisme, atau sosialisme, melainkan lebih memilih keterlibatan berdasarkan isu yang dianggap relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya isu lingkungan, kesetaraan gender, dan HAM ([Putra et al., 2025](#)). Identitas politik berbasis isu ini membuat generasi muda lebih adaptif, tetapi juga rentan berubah sesuai tren yang berkembang di media sosial.

Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman normatif dalam kehidupan politik generasi muda. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, memiliki relevansi besar untuk menjawab tantangan demokrasi Indonesia. Namun, kenyataannya, Pancasila seringkali hanya dipahami sebagai hafalan formal dalam pendidikan, bukan sebagai kerangka etika yang hidup dalam keseharian ([Tirtoni, 2022](#)).

Generasi muda kerap mengalami kesenjangan antara teori dan praktik. Meskipun mereka mengenal Pancasila sejak pendidikan dasar, internalisasi nilai-nilainya masih lemah. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh tren media sosial daripada menjadikan Pancasila sebagai landasan sikap politik ([Zura et al., 2023](#)). Hal ini mengakibatkan Pancasila kehilangan peran strategisnya dalam meredam polarisasi politik maupun memperkuat etika berpolitik.

Revitalisasi nilai Pancasila penting dilakukan agar generasi muda dapat menjadikannya pedoman dalam kehidupan politik. [Aini dan Dewi \(2022\)](#) menekankan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol, melainkan harus diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata yang mencerminkan gotong royong, keadilan, dan toleransi. [Purnama dan Ananda \(2020\)](#) juga menambahkan bahwa

motivasi internal generasi muda dalam mengamalkan Pancasila masih rendah, sehingga diperlukan strategi pendidikan politik yang lebih kontekstual, terutama di era digital.

Jika Pancasila berhasil diinternalisasi, generasi muda bukan hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi lebih sehat dan inklusif. Dengan kata lain, Pancasila bisa menjadi filter moral yang mengarahkan partisipasi politik generasi muda agar tetap berpijak pada nilai persatuan bangsa di tengah keberagaman.

Tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda dalam berpartisipasi politik adalah rendahnya literasi politik. Minimnya pemahaman mengenai sistem politik, fungsi lembaga negara, dan proses kebijakan membuat mereka rentan terhadap hoaks dan misinformasi ([Faturachman & Tutiasri, 2023](#)). Hal ini diperparah dengan deras arus informasi di media sosial yang sering kali tidak tervalidasi. Akibatnya, generasi muda mudah terjebak dalam polarisasi politik, karena cenderung hanya mengonsumsi informasi dari kelompok atau tokoh yang mereka ikuti.

Namun, di balik tantangan ini, terdapat peluang besar melalui media sosial. Data menunjukkan bahwa lebih dari 90% generasi Z menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi politik ([Zainudin, 2024](#)). Media sosial memungkinkan lahirnya aktivisme digital, di mana generasi muda bisa menyuarakan pendapat, menggalang solidaritas, hingga mengorganisasi aksi politik hanya dengan memanfaatkan platform daring ([Ramadhani et al., 2025](#)). Fenomena ini memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang demokratis baru yang lebih partisipatif.

Salah satu fenomena menarik adalah munculnya FoMO politik (Fear of Missing Out). Banyak generasi muda mengikuti isu politik bukan karena pertimbangan rasional, melainkan karena takut ketinggalan dari kelompok sebaya. Meski sering dianggap negatif, FoMO politik bisa menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesadaran politik. Dengan adanya FoMO, pemuda terdorong untuk mengikuti perkembangan isu dan pada akhirnya membangun kepedulian politik yang lebih substansial ([Hernawan & Azizah, 2024](#); [Tualeka, 2025](#)).

Dengan demikian, meskipun literasi politik generasi muda masih rendah, media sosial dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi politik. Tantangannya adalah bagaimana mengarahkan media sosial agar tidak sekadar menjadi ruang reproduksi polarisasi, melainkan arena pembelajaran politik yang sehat. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat pendidikan politik berbasis Pancasila dan membangun ekosistem digital yang mendorong diskusi kritis ([Irwandi et al., 2023](#)). Jika strategi ini berhasil dilakukan, maka generasi muda berpotensi menjadi motor penggerak demokrasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis nilai kebangsaan.

## Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam keberlanjutan demokrasi Indonesia, namun partisipasi mereka masih dipengaruhi berbagai faktor psikologis dan struktural. Dari sisi persepsi, generasi muda cenderung melihat demokrasi sebagai sarana kebebasan berekspresi, tetapi kepercayaan mereka melemah akibat praktik oligarki, politik uang, dan dinasti politik ([Muhtadi, 2019](#); [Nafian, 2025](#)). Hal ini berimplikasi pada meningkatnya sikap skeptis dan apatisisme politik, meskipun jumlah pemilih muda sangat signifikan dalam pemilu ([Ningrum, 2023](#); [Ayu, 2024](#); [Septianingrum, 2025](#)). Sikap politik generasi muda terbentuk melalui

faktor efikasi politik, identitas, serta emosi kolektif yang berhubungan dengan isu-isu tertentu, seperti lingkungan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia (Albary, 2025; Putra et al., 2025; Tualeka, 2025). Media sosial berperan besar dalam membentuk keterlibatan ini, meskipun pada saat yang sama membuka ruang bagi disinformasi dan fenomena *fear of missing out* yang memengaruhi perilaku politik (Zainudin, 2024; Hernawan & Azizah, 2024; Ramadhani et al., 2025).

Nilai-nilai Pancasila, khususnya persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, berpotensi menjadi pedoman moral dalam partisipasi politik generasi muda. Namun, implementasinya masih lemah karena pemahaman cenderung dangkal dan terbatas pada aspek formalitas (Tirtoni, 2022; Zura et al., 2023). Oleh sebab itu, revitalisasi nilai Pancasila melalui pendidikan politik yang kontekstual dan adaptif terhadap media digital sangat diperlukan agar Pancasila benar-benar terinternalisasi dalam psikologi politik generasi muda (Aini & Dewi, 2022; Purnama & Ananda, 2021).

### Saran

Kajian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan literatur sekunder yang tersedia secara daring dalam rentang tahun tertentu, sehingga dinamika politik terbaru mungkin belum sepenuhnya tercakup (Mujani & Liddle, 2021). Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat disarankan untuk melengkapi hasil ini. Dengan demikian, penguatan demokrasi berbasis Pancasila harus diarahkan melalui peningkatan literasi politik, pendidikan etika demokrasi, serta penciptaan ruang partisipasi yang lebih inklusif agar generasi muda dapat berperan optimal sebagai agen perubahan demokrasi di Indonesia.

### Referensi

- Adnan, A. F. (2024, Januari 17). KPU: 60 persen dari 204 juta pemilih adalah generasi muda. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3920133/kpu-60-persen-dari-204-juta-pemilih-adalah-generasi-muda>
- Affandi, R., & Katimin. (2025, Juni 10). Idealisme politik generasi milenial (optimisme dan pesimisme dalam arah baru demokrasi Indonesia). *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 4, 316–322. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i2.5296>
- Affandi, M., & Katimin. (2025). Demokrasi digital dan polarisasi politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 55–67.
- Aini, N. Q., & Dewi, D. A. (2022, Agustus). Sistem etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 11120–11125. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4200>
- Aini, F., & Dewi, S. (2022). Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 112–120.
- Albary, R. H. (2025). Peran pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan remaja. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(3), 143–152. <https://doi.org/10.63082/jksh.v1i3.19>
- Alscher, P., Graf, E., & McElvany, N. (2025). Political participation and the Civic Voluntarism Model: How do resources, psychological engagement, and recruitment shape willingness to participate during adolescence? *Journal of Experimental Psychology: General*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1037/xge0001766>
- Associated Press. (2024, Februari 8). Indonesian presidential hopefuls are trying social

- media, K-pop to win young voters. AP News.
- Ayu, R. D. (2024, Februari 2). Kenapa orang pilih golput saat pemilu? Ini alasannya. Tempo.co. <https://www.tempo.co/pemilu/kenapa-orang-pilih-golput-saat-pemilu-ini-alasannya-91353>
- Ditto, P. H., Liu, B. S., Clark, C. J., Wojcik, S. P., Chen, E. E., Grady, R. H., & Zinger, J. F. (2019). At least bias is bipartisan: A meta-analytic comparison of partisan bias in liberals and conservatives. *Perspectives on Psychological Science*, 14(2), 273–291. <https://doi.org/10.1177/1745691617746796>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Fathruochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (2023, September). Penerimaan generasi Z terhadap polarisasi politik. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6, 6837–6845. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2833>
- Hasyati, A. (2023, November 7). Pemilu 2024, berebut suara pemilih muda. Datanesia. <https://datanesia.id/pemilu-2024-berebut-suara-pemilih-muda>
- Hernawan, & Azizah, S. (2024, Agustus 26). Boy Candra bicara FOMO politik: Ketertarikan yang menggerakkan perubahan. Yoursay.id. <https://yoursay.suara.com/kolom/2024/08/26/155744/boy-candra-bicara-fomo-politik-ketertarikan-yang-menggerakkan-perubahan>
- Huddy, L., Sears, D. O., & Levy, J. S. (Eds.). (2013). *The Oxford handbook of political psychology* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Huddy, L., Sears, D. O., & Levy, J. S. (Eds.). (2023). *The Oxford handbook of political psychology* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Irwandi, M. D., Akbar, R., & Santa, R. (2023). Analisis kesadaran generasi muda Indonesia dalam dunia politik. *Jurnal Sosio dan Humaniora*, 2(1), 1–10.
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The origins and consequences of affective polarization in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22, 129–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>
- Jennings, M. K., Stoker, L., & Bowers, J. (2009). Politics across generations: Family transmission reexamined. *The Journal of Politics*, 71(3), 782–799. <https://doi.org/10.1017/S0022381609090719>
- Komisi Pemilihan Umum. (2023, Juni 23). 55% pemilih didominasi generasi muda, bantu KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU.go.id. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11684/55-pemilih-didominasi-generasi-muda-bantu-kpu-dalam-penyelenggaraan-pemilu-2024>
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2018). *News framing effects*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315208077>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Nafian, M. I. (2025, Agustus 27). IMGR 2026: Generasi muda tak percaya lembaga politik! IDN Times. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/survei-imgs-generasi-muda-tak-percaya-lembaga-politik-00-rgfwk-y8pp3d>
- Ningrum, N. R. (2023, November 29). Generasi muda golput di pemilu 2024, bukan pilihan yang bijak. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/nurulrahmaa/6566d9c112d50f26f72a6412/generasi-muda-golput-di-pemilu-2024-bukan-pilihan-yang-bijak>
- Noor, F. (2018). Oposisi dalam kehidupan demokrasi: Arti penting keberadaan oposisi sebagai bagian penguatan demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia,

42(1), 1–17. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.358>

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45806/uu-no-40-tahun-2009>
- Purnama, F., & Ananda, A. (2021, Desember). Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda Karang Taruna Balai Tongah Koto. *Jurnal Pembangunan dan Pendidikan*, 8, 126–133. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v8i2.38775>
- Putra, A., Asrul, Rajab, M., & Nur, L. O. M. A. (2025, Juli 6). Dinamika partisipasi politik generasi muda dalam pemilu di era media sosial. *PRINSIP: Portal Riset & Inovasi Sistem Perangkat Lunak*, 3, 125–130. <https://doi.org/10.59696/prinsip.v3i3.165>
- Ramadhani, S. P., Kurniawati, N. D., Nurcahyani, A., Khasanah, A. N., & Syaharani, N. V. (2025). Media sosial: Pemantik partisipasi politik generasi Z menuju Pilkada Jakarta yang bermakna. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1).
- Satria Zura, R. J., Sholihah, A. N., & Ardani, R. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di era globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(5).
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Dalam satu naskah [PDF]. JDIH Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). <https://jdih.bapeten.go.id/>
- Septianingrum, A. P. (2025, Mei 4). Pemuda dan politik: Antara apatisisme dan harapan perubahan. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/andika-putri-1745839082122720097/pemuda-dan-politik-antara-apatisme-dan-harapan-perubahan-24zxDuqcY9x/full>
- Tirtoni, F. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter dasar generasi muda di era society 5.0. *Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(2).
- Tualeka, M. I. (2025, September 8). Gen Z, FOMO, dan tragedi di balik demonstrasi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/08/12495841/gen-z-fomo-dan-tragedi-di-balik-demonstrasi>
- Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2023). Systematic-narrative hybrid literature review: A strategy for integrating a concise methodology into a manuscript. *Social Sciences & Humanities Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100381>
- Zainudin, A. (2024). The role of social media in increasing rural Generation Z participation in the 2024 elections: A study in Sungai Ana village, Sintang district. *Fokus: Publikasi Ilmiah Universitas Kapuas Sintang*, 22(2).
- Zura, S. R. J., Sholihah, A. N., & Ardani, R. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di era globalisasi. *Indigenous Knowledge*, 2(5).